



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHYAR HAERUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 897275

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/70 m² di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/63 m² di KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 254.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FU 150 SDC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.470.057

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 637.770.057

III. HUTANG Rp. 273.576.484

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 364.193.573

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.